



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 91 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN KADUNGORA TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Kadungora Tahun 2022;
 - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Kadungora Tahun 2022;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN KADUNGORA TAHUN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Renja Kecamatan Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

Pasal 3

(1) Renja Kecamatan Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2022.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDINYANA

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 91**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 91 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN
KADUNGORA TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka “**Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur serta Penguatan Pelayanan Publik Untuk Kesejahteraan Masyarakat**” dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun, Renstra SKPD untuk 5 tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun dan Rencana Kerja SKPD untuk 1 tahun

Kecamatan Kadungora sebagai salah satu lembaga dalam sistem pemerintahan daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kecamatan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”, Kecamatan Kadungora telah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yaitu Rencana Strategis yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 223 - 226 Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengembalian tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan , evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Perencanaan yang disusun secara berjenjang mulai tingkat Desa dan kelurahan lebih lanjut menjadi input yang berharga bagi Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan dan sekaligus menggambarkan utuhnya rangkaian Sistem Perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Penyelarasan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Kadungora Tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kadungora Tahun 2022 dilakukan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang KLHS;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 581);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 38);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Garut.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
26. Peraturan Bupati Garut Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Garut.
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024.
28. Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Disusunnya Penyelarasan Rencana Kerja Kecamatan Kadungora Tahun 2022 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Kadungora guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

1.3.2 Tujuan

Disusunnya Penyelarasan Rencana Kerja Kecamatan Kadungora Tahun 2022 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Kadungora;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahunan SKPD sebagai implementasi dari Rencana Strategis SKPD Kecamatan Kadungora yang berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Garut yang merupakan bagian yang terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Garut untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

Adapun sistematika yang digunakan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II :HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN KADUNGORA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kadungora Tahun 2021 dan Capaian Renstra Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut;

2.1.1 Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kadungora tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Kadungora sudah disahkan.

2.1.2 Pencapaian target Renstra Kecamatan Kadungora berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Kadungora tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Garut dan Peraturan Bupati Garut Nomor 248 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi Kecamatan Pola A dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Kadungora;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Kadungora, dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kadungora serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

2.5 Penelaahan hasil musrenbang tingkat desa serta musrenbang tingkat kecamatan menggambarkan pembangunan di Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut yang direncanakan untuk tahun anggaran 2022 dengan berbagai usulan dari masyarakat diantaranya usulan Bidang Pemerintahan; Bidang Ekonomi; Bidang Sosial dan Budaya dan Bidang Inprastruktur.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional;

Yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Garut dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Kadungora.

3.3 Program dan Kegiatan Proritas

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

BAB V : PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN AKDUNGORA

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KADUNGORA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

2.1.1 Hasil Pelaksanaan Evaluasi Rencana Kerja Rencana Kerja Kecamatan Kadungora

Merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Kadungora. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kadungora ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Kadungora selama Tahun 2020.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kadungora 2020 telah terlewati dengan Target sebesar Rp. 1.584.585.180,- dan Realisasi Target sebesar Rp. 1.580.284.080,- dengan capaian Presentase sebesar 98.47% dan sisa Anggaran yang dikembalikan karena mengalami efisiensi sebesar Rp. 24.301.100,- dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai pada tahun 2020 maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kadungora Tahun 2020 antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional
- 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 10) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 11) Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu :

- 1) Pembangunan Rumah Dinas
- 2) Pembangunan Gedung Kantor
- 3) Pengadaan Kendaraan Dinas
- 4) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 5) Pengadaan Mebeuler
- 6) Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
- 7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 8) Penataan Halaman Gedung Kantor
- 9) Penambahan Lokal Gedung Kantor
- 10) Penataan Ruang Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yaitu :

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Kecamatan

4. Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penunjang Kegiatan Kecamatan yaitu :

- 1) Pelaporan Keuangan
- 2) Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

5. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan yaitu :

- 1) Pembinaan Teknis Pelaksanaan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan
- 2) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Ditingkat Desa
- 3) Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan
- 4) Rapat Forum Koordinasi Kecamatan (FORKONCAM)
- 5) Penyusunan RPTK Kecamatan
- 6) Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan
- 7) Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga
- 8) Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat ditingkat Kecamatan
- 9) Penyelenggaraan Kegiatan TP-PKK Kecamatan
- 10) Pembinaan RT/RW dan Lembaga Kemasyarakatan
- 11) Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya
- 12) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

6. Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yaitu :

- 1) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Renja 2020

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Kadungora dalam pelaksanaan Renja 2020 terdapat 15 (lima belas) Program/Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi, antara lain :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman prosentase realisasi keuangan 80,00 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 24.000.000,- terealisasi Rp. 19.200.000,-
- b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Rapat-Rapat dan Pembinaan Ke Dalam Daerah prosentase realisasi keuangan 80,02 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 30.150.000,- terealisasi Rp. 24.125.000,-
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Camat dan Garasi prosentase realisasi keuangan 97,49% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 404.979.000,- terealisasi Rp. 394.794.820,-
- d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/Kantor prosentase realisasi keuangan 24,39% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 20.910.000,- terealisasi Rp. 5.100.000,-
- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Penataan Ruang Gedung Kantor prosentase realisasi keuangan 54.81% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 102.169.800,- terealisasi Rp. 56.000.000,-
- f. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Fungsional Kecamatan prosentase realisasi keuangan 0% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 15.000.000,- terealisasi Rp. 0,-
- h. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa prosentase realisasi keuangan 80,92% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 14.595.000,- terealisasi Rp. 11.811.000,-
- i. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Kegiatan Monitoring Proyek Pembangunan prosentase realisasi keuangan 83,78% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 7.514.000,- terealisasi Rp. 6.295.000,-

- j. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Kegiatan Pembinaan dan Monitoring PBB prosentase realisasi keuangan 89,46% dengan pagu anggaran tahun 2020Rp. 23.105.000,- terealisasi Rp. 20.669.000,-
- k. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Kegiatan Keagamaan prosentase realisasi keuangan 40,32 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 19.012.000,- terealisasi Rp. 7.666.000,-
- l. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga prosentase realisasi keuangan 0% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 50.000.000,- terealisasi Rp. 0,-
- m. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan TP-PKK Tingkat Kecamatan prosentase realisasi keuangan 86.64% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 10.420.000,- terealisasi Rp. 8.820.000,-
- n. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara Lainnya prosentase realisasi keuangan 54.35% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 20.489.000,- terealisasi Rp. 11.136.000,-
- o. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum prosentase realisasi keuangan 84.10% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 7.660.000,- terealisasi Rp. 6.442.000,-
- p. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan (PATEN) prosentase realisasi keuangan 93,39 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 71.092.300,- terealisasi Rp. 67.324.300,-

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	24.000.000	19.200.000	80,00
2	Kegiatan Rapat-Rapat dan Pembinaan Ke Dalam Daerah	30.150.000	24.125.000	80,02
3	Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Camat dan Garasi	404.979.000	394.794.820	97,49
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/Kantor	20.910.000	5.100.000	24,39
5	Kegiatan Penataan Ruang Gedung Kantor	102.169.800	56.000.000	54,81
6	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Fungsional Kecamatan	15.000.000	0	0
7	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	14.595.000	11.811.000	80,92
8	Kegiatan Monitoring Proyek Pembangunan	23.105.000	20.669.000	89,46
9	Kegiatan Pembinaan dan Monitoring PBB	23.105.000	20.669.000	89,46
10	Kegiatan Keagamaan	19.012.000	7.666.000	40,32
11	Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga	50.000.000	0	0
12	Kegiatan Penyelenggaraan TP-PKK Tingkat Kecamatan	10.420.000	8.820.000	86,64
13	Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara Lainnya	20.489.000	11.136.000	54,35
14	Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	7.660.000	6.442.000	84,10
15	Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan (PATEN)	71.092.300	67.324.300	93,39

2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Kadungora dalam pelaksanaan Renja 2020 Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran, antara lain :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 18.000.000,- terealisasi Rp. 18.000.000,-
- b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 2.789.000,- terealisasi Rp. 2.789.000,-

- c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 7.658.000,- terealisasi Rp. 7.658.000,-
- d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 6.500.000,- terealisasi Rp. 6.500.000,-
- e. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 33.595.200,- terealisasi Rp. 33.595.200,-
- f. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 10.778.000,- terealisasi Rp. 10.778.000,-
- g. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 7.809.190,- terealisasi Rp. 7.809.190,-
- h. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp.113.670.000,- terealisasi Rp. 113.670.000,-
- i. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp.5.453.900,- terealisasi Rp. 5.453.900,-
- j. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp.5.400.000,- terealisasi Rp. 5.400.000,-

- k. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp.15.177.700,- terealisasi Rp. 15.177.700,-
- l. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Penataan Halaman Gedung Kantor prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 223.382.160,- terealisasi Rp. 223.382.160,-
- m. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Penataan Halaman Gedung Kantor prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 174.635.000,- terealisasi Rp. 174.635.000,-
- n. Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan Kegiatan Pelaporan Keuangan prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 3.200.000,- terealisasi Rp. 3.200.000,-
- o. Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 3.200.000,- terealisasi Rp. 3.200.000,-
- p. Program Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Kegiatan Pembinaan Teknis Pelaksanaan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 6.765.000,- terealisasi Rp. 6.765.000,-
- q. Program Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Kegiatan Rapat Forum Koordinasi Kecamatan (FORKOPIMCAM) prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 5.250.000,- terealisasi Rp. 5.250.000,-
- r. Program Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Kegiatan Penyusunan RPTK prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 9.000.000,- terealisasi Rp. 9.000.000,-

- s. Program Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 7.190.000,- terealisasi Rp. 7.190.000,-
- t. Program Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Kegiatan Pembinaan RT/ RW dan Lembaga Kemasyarakatan prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 7.414.000,- terealisasi Rp. 7.414.000,-
- u. Program Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Kegiatan Monitoring Program BPNT prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 7.999.750,- terealisasi Rp. 7.999.750,-

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah
Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Kegiatan	Tahun 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	18.000.000	100
2.	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2.789.000	2.789.000	100
3.	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7.658.000	7.658.000	100
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	6.500.000	6.500.000	100
5.	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	33.595.200	33.595.200	100
6.	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.778.000	10.778.000	100
7.	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.809.190	7.809.190	100
8.	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113.670.000	113.670.000	100
9.	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.453.900	5.453.900	100
10.	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000	5.400.000	100

11.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	15.177.700	15.177.700	100
12.	Kegiatan Penataan Halaman Gedung Kantor	223.382.160	223.382.160	100
13.	Kegiatan Penataan Halaman Gedung Kantor	174.635.000	174.635.000	100
14.	Kegiatan Pelaporan Keuangan	3.200.000	3.200.000	100
15.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan	3.200.000	3.200.000	100
16.	Kegiatan Pembinaan Teknis Pelaksanaan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan	6.765.000	6.765.000	100
17.	Kegiatan FORKOPIMCAM	5.250.000	5.250.000	100
18.	Kegiatan Penyusunan RPTK	9.000.000	9.000.000	100
19.	Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	7.190.000	7.190.000	100
20.	Kegiatan Pembinaan RT/ RW dan Lembaga Kemasyarakatan	7.414.000	7.414.000	100
21.	Kegiatan Monitoring Program BPNT	7.999.750	7.999.750	100

3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada tahun anggaran 2021, tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2021 Perangkat Daerah Kecamatan Kadungora.

4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Adapun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

- a. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/kelurahan;
- b. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kadungora adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kadungora tahun 2020 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Kadungora pada umumnya.
 - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kadungora berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Kadungora.
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :
- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
 - b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

2.

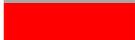
2.1.2 Evaluasi Capaian Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut Tahun 2020

Renstra SKPD Kecamatan Kadungora merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Kadungora selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut. Rencana Kerja – Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Kadungora yang diprogram setiap 1 (satu) tahun merupakan suatu usulan rancangan program/kegiatan yang disampaikan kepada BAPPEDA untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut yang nantinya program/kegiatan tersebut dievaluasi setiap 1 tahun anggaran. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2020, dan realisasi Renstra SKPD seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Kadungora
Kabupaten Garut Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81	Triwulan 1				
						Triwulan 2	81	80.58	99.48	
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	81	82.75	102.16	
						Kondisi Akhir (F)		82.75	102.16	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	2.1	Persentase Desa Yang Berkinerja Baik	%	100	Triwulan 1	25	25	100.00	
						Triwulan 2	25	25	100.00	
						Triwulan 3	25	25	100.00	
						Triwulan 4	25	25	100.00	
						Kondisi Akhir (F)		100	100.00	
3	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas Kinerja Aparatur Kecamatan	3.1	Nilai Sakip Kecamatan	Opini	BB	Triwulan 1				
						Triwulan 2				
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	BB	BB	100.00	
						Kondisi Akhir (F)		BB	100.00	

Keterangan

Warna	Prosentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 3 indikator kinerja Kecamatan Kadungora tahun 2020, tidak ada indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target.
2. Indikator kinerja yang pada kondisi akhir mencapai target 100% sebanyak 2 indikator kinerja yaitu indikator kinerja Persentase Desa Yang Berkinerja Baik dan indikator nilai sakip kecamatan.
3. Indikator kinerja yang pada kondisi akhir melebihi target 100% ada 1 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dimana dari target 100% pencapaiannya sampai 102, 16%.
4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target indikator kinerja, adalah karena indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;

Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2020 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra SKPD 2019-2024 pada tahun ke 4 pelaksanaan Renstra Kecamatan Kadungora. Dengan tercapainya target capaian Renstra SKPD 2019-2024 sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak perlu adanya penyesuaian target capaian pada Renstra SKPD 2019-2024.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja SKPD Kecamatan Kadungora selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut ini :

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2020
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Kadungora Lembar : 1 sd.3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
7											
		URUSAN WAJIB									
7	01										
		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN									
7	01	19	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %		100 %		
7	01	19	01	002	Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	100 %	100 %	100 %	
7	01	19	01	006	Kegiatan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Operasional	100 %	100 %	100 %	100 %	
7	01	19	01	008	Kegiatan Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman	100 %	100 %	100 %	100 %	
7	01	19	01	009	Kegiatan Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya perlengkapan dan peralatan kerja yang baik	100 %	100 %	100 %	100 %	
7	01	19	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	
7	01	19	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan	100 %	100 %	100 %	100 %	
7	01	19	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan penerangan dan peralatan listrik lainnya	100 %	100 %	100 %	100 %	
7	01	19	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	
7	01	19	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah tangga	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	
7	01	19	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bertambahnya pengetahuan dan wawasan pegawai	100 %	100 %	100 %	100 %	
7	01	19	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat	100 %	80 %	100 %	80 %	80 %

7	01	19	01	094	Kegiatan Rapat-Rapat dan Pembinaan ke Dalam Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100 %	80,02 %	100 %	80,02 %	80,02 %	100 %	80,02 %	80,02 %
7	01	19	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100 %		100 %			100 %		
7	01	19	02	002	Kegiatan Pembangunan Rumah Camat dan Garasi	Tersedianya Rumah Dinas Camat	100%	97,49 %	100 %	97,49 %	97,49 %	100 %	97,49 %	97,49 %
		19		003	Kegiatan Pembangunan Gedung/ Kantor	Tersedianya Gedung Kantor KB yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		19		022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/ Kantor	Tersedianya Gedung/ Kantor Yang Resrepresentatif	100%	24,39 %	100 %	24,39 %	24,39 %	100 %	24,39 %	24,39 %
7	01	19	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		19		045	Kegiatan Penataan Halaman gedung/ kantor	Terpenuhi Halaman Gedung/ Kantor Yang Memadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	19	02	067	Kegiatan Penambahan Loka Ruang Gedung/ Kantor	Terpenuhi sarana masjid yang rereferentatif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	19	02	068	Kegiatan Penataan Ruang Gedung/ Kantor		100%	54,81%	100%	54,81%	54,81%	54,81%	54,81%	54,81%
7	01	19	05		PEROGAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Meningkatnya Sumberdaya Aparatur Kecamatan	100 %		100 %			100 %		
7	01	19	05	101	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Kecamatan	Tersedianya Sumberdaya Aparatur yang handal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	19	05		Kegiatan Pengumpulan Data dan Penyusunan Pelaporan SKPD	Terpenuhi kewajiban pelaporan yang tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	19	11		PROGRAM PERENCANAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN	Meningkatnya system Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	100 %		100 %			100 %		
7	01	19	11	001	Kegiatan Pelaporan Keuangan	Terpenuhi kebutuhan Pelaporan Keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	19	11	002	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersedianya Dokumen Perencanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	19	82		PROGRAM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM TINGKAT KECAMATAN	Meningkatnya penyelenggaraan tugas pemerintah umum tingkat kecamatan	100 %		100 %			100 %		
7	01	19	82	009	Kegiatan Pembinaan Teknis Pelaksanaan Perlombaan Desa/ Kelurahan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Usulan Desa untuk lomaba tingkat Kabupaten	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	19	82	011	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Ditingkat Desa	Terwujudnya Pemerintahan Desa yang baik	100%	80,92%	100%	80,92%	80,92%	80,92%	80,92%	80,92%

7	01	19	82	056	Kegiatan Monitoring Proyek Pembangunan	Terwujudnya Dokumentasi Pelaksanaan Proyek Pembangunan Desa	100%	89,46%	100%	89,46%	89,46%	89,46%	89,46%	89,46%
7	01	19	82	057	Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kesadaran Kolektor Dalam Pengelolaan PBB	100%	89,46%	100%	89,46%	89,46%	89,46%	89,46%	89,46%
7	01	19	82	088	Kegiatan Rapat Koordinasi Forum Kecamatan (FORKOPIKAM)	Terjalannya Koordinasi yang maksimal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	19	82	132	Kegiatan Penyusunan RPTK Kecamatan	Terwujudnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	19	82	133	Kegiatan Penyelenggaraan Keagamaan	Meningkatnya ketakwaan dan keimanan masyarakat	100%	40,32%	100%	40,32%	40,32%	40,32%	40,32%	40,32%
7	01	19	82	134	Kegiatan Penyelenggaraan Kepemudaan dan Olah Raga	Meningkatnya kegiatan Kepemudaan dan Olahraga	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
7	01	19	82	138	Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Ditingkat Kecamatan	Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam kehidupan social ekonomi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	19	82	145	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan TP. PKK Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan TP. PKK Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	19	82	146	Kegiatan Pembinaan RT/ RW dan lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Pengetahuan RT/ RW	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	19	82	148	Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional Dan Upacara/Acara Lainnya	Lancarnya Kegiatan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara Lainnya	100%	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %
7	01	19	82	170	Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di wilayah Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	19	82	171	Kegiatan Monitoring BPNT	Lancarnya kegiatan pelaksanaan Program Kemiskinan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	19	83		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU (PATEN)	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Terpadu Masyarakat	100 %		100 %			100 %		
7	01	19	83	002	Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan (PATEN)	Tercapainya Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan	100 %	99,93 %	100 %	99,93 %	99,93 %	100 %	99,93 %	99,93 %

Berdasarkan tabel diatas sesuai dengan fungsi Kecamatan yang merupakan fungsi staf melakukan program dan kegiatan hanya dalam rangka mendukung terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan oleh SKPD teknis sehingga bentuk program dan kegiatan hanya menunjukkan keberhasilan dari kegiatan tersebut tanpa dapat memperhitungkan dampak keberhasilan dalam mendukung kebijakan pemerintah. Selain itu pula sekretariat sebagai fungsi staf bertugas memberikan pelayanan terhadap pimpinan dan SKPD teknis dalam rangka mendukung lahirnya kebijakan-kebijakan pemerintah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Garut dan Peraturan Bupati Garut Nomor 248 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi Kecamatan Pola A. Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Kadungora terdiri dari :

- a. Camat Membawahi
 1. Sekmat
 2. Seksi Tata Pemerintahan
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum
 5. Seksi Pelayanan
 6. Seksi Kesejahteraan rakyat.

b. Sekretaris Kecamatan Membawahi :

1. Kasubag Umum
2. Subbagian keuangan; dan
3. Subbagian perencanaan evaluasi dan pelaporan

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut diatur dalam Peraturan Bupati Garut Nomor Nomor 556 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi Kecamatan Pola A. Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Garut. diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut.

- 1) Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pelayanan, dan kesejahteraan rakyat;
- b. Penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan, dan kesejahteraan rakyat;
- c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja kecamatan.

Camat Membawahi:

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Tata Pemerintahan;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pelayanan;
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas pokok merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
- b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
- c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
- d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

Sekretaris, membawahkan:

- a. Subbagian Umum,Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Subbagian keuangan dan BMD ; dan

2). Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya dan melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
- b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian umum.
- e. penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- f. pelaksanaan pelayanan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

3). Subbagian Keuangan dan BMD

Dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan rencana anggaran kecamatan;
- b. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan kecamatan;
- c. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian keuangan.

4). Seksi Tata Pemerintahan

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi tata pemerintahan;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tata pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi tata pemerintahan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi tata pemerintahan;
- c. pengumpulan dan Pengolahan dataseksi tata pemerintahan;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi tata pemerintahan.

5). Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pengumpulan dan Pengolahan data seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa.

6). Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara administratif kepada camat dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada kepala satuan polisi pamong praja melalui camat, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pengumpulan dan Pengolahan data seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan sebagai kepala satuan unit pelaksana polisi pamong praja; dan
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi ketentraman dan ketertiban umum.

7). Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pelayanan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi pelayanan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pelayanan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pelayanan;
- c. pengumpulan dan Pengolahan data seksi pelayanan;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pelayanan.

8). Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi kesejahteraan rakyat.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi kesejahteraan rakyat;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi kesejahteraan Masyarakat;
- c. pengumpulan dan Pengolahan data seksi kesejahteraan rakyat;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi Kesejahteraan Masyarakat.

Sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Garut sebagaimana telah disampaikan bahwa pelayanan Kecamatan Kadungora di utamakan dalam rangka mendukung terhadap lahirnya kebijakan – kebijakan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Kadungora sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks kepuasan masyarakat			81,00	82,5	82,5	823	83	80,58	81	82	
2	Prosentase Desa Berkinerja Baik			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	
3	Kategori Pelayanan Prima Unit Penyelenggara Pelayanan Publik			BB	BB	A-	A-	A	BB	BB	BB	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,

Isu Strategis Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam tingkat keberhasilan pencapaian sasaran sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kadungora yaitu :

1. Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip good governance ;
2. Masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur;
3. Belum tertibnya Administrasi.
4. Belum Optimalnya Kinerja Dalam Pelayanan Publik/Pelayanan Publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat;

Dari isu-isu permasalahan tersebut, maka Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut merumuskan kebutuhan pembangunan dan berbagai program yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada. Strategi merupakan cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran yang dijabarkan pada kebijakan program dan kegiatan selama lima tahun. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mempertajam makna dari strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan dalam suatu arah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Kegiatan adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut dalam merealisasikan program. Kegiatan akan dilaksanakan secara bertahap setiap tahun selama lima tahun, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1) Pemanfaatan

Peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

2) **Optimalisasi**

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) **Pelayanan Prima.**

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4) **Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.**

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesioanal dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat

2.4 Review terhadap RKPD,

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kadungora serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Kadungora berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kadungora.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2022 yang diusulkan Kecamatan Kadungora sebesar Rp. 4.944.985.460,-.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Kadungora diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD 2022 Kecamatan Kadungora mengusulkan 6 (enam) Program dengan 17 (Tujuh Belas) kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. Program dan kegiatan pada Kecamatan Kadungora mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel T-C.31
Review Terhadap Penyelarasan Awal RKPD Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7		UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01	KECAMATAN													
7	0101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
7	0101	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
7	0101	2.0101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	1 Dokumen		20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			23,000,000	
7	0101	2.0102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Dokumen RKA-SKPD		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	1 Dokumen		10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12,000,000	
7	0101	2.0103	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	1 Dokumen		10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12,000,000	
7	0101	2.0104	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Dokumen DPA-SKPD		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	1 Dokumen		10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Indikatif (Rp.)		umber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01012.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
7	01012.0105		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		1 Dokumen		10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			12,000,000	
7	01012.0106		Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Keuangan		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		1 Dokumen		10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			12,000,000	
7	01012.0107		Jumlah Dokumen Tata Laksana Pelayanan Publik		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		1 Dokumen		25,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			30,000,000	
7	0101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,525,000,000				2,629,500,000	
7	01012.0201		Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		12 Bulan		2,500,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			2,600,000,000	
7	01012.0205		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		1 Dokumen		10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			12,000,000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01 01 202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
7	01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semes teran SKPD		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Berkas untuk Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		12 Bulan		15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			17,500,000
7	01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								15,000,000			17,500,000	
7	01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Perencanaan BMD		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		4 Dokumen		15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			17,500,000
7	01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								80,000,000			88,500,000	
7	01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Kebutuhan Pakaian Dinas Pegawai		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		33 Orang		30,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			32,000,000
7	01 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Sistem Informasi Kepegawaian		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		12 Bulan		25,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			27,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Indikatif (Rp.)		umber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
7	01	01	2.0509	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pengiriman ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		4 Orang		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17,500,000
7	01	01	2.0510	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Peserta Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		70 Orang		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12,000,000
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					328,000,000					349,000,000		
7	01	01	2.0601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		10 Item		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17,500,000
7	01	01	2.0602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		12 Item		150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			155,000,000
7	01	01	2.0603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang memadai		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		16 Item		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			23,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Indikator (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		2 jenis		22,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			24,000,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar sesuai kebutuhan	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		4 jenis		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12,000,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		1350 Orang		36,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			38,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		336 Orang		60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			62,000,000
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Operator Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		2 Orang		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17,500,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7	01	01	2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					960,000,000				94,500,000		
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		3 Unit		120,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0
7	01	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Kendaraan Dum Truk Pengangkut Sampah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		1 Unit		600,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		3 jenis		75,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			77,000,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya (Jet Pum)p	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		1 Unit		15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			17,500,000
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Bangunan Lainnya (Pemagaran Kantor Kecamatan)	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		1 Gedung		150,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 0101 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								82,000,000				88,500,000	
7 01 01 2.0802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telpon dan Internr		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan			12 Bulan	19,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			21,000,000	
7 01 01 2.0803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan			7 Item	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17,500,000	
7 01 01 2.0804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Petugas Kebersihan Kantor		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan			2 Orang	48,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000	
7 0101 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								85,000,000				93,500,000	
7 01 01 2.0901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Pembayaran STNK Pajak Kendaraan Roda 4 dan Roda 2		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan			9 Unit	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			32,000,000	
7 01 01 2.0903	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Jumlah Kendaraan Alat Besar Yang Memadai/ Terpelihara		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan			1 Unit	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17,500,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebeler Yang Memadai/ Terpelihara		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		3 Jenis		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12,000,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Bangunan/ Gedung Yang Terpelihara (Rumah Dinas dan Gedung Kantor)		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		2 Gedung		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				32,000,000
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								344,000,000			351,000,000		
7 01 02 2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								214,000,000			216,000,000		
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Jenis Pelaksanaan Kegiatan (1. Penanggulangan Covid 2. Peningkatan 3. Pembinaan Desa 4. Lomba Desa 5. Phbn 6. Monitoring Bpnt 7. Pbb 8. Monitoring Proyek Pembangunan)		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		8 Jenis		214,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				216,000,000
7 01 02 2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								80,000,000			82,000,000		
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Jenis Pelaksanaan Pelayanan (1 Paten 2. SKM)		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		2 jenis		80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				82,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Indikatif (Rp.)		umber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 02 2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								50,000,000				53,000,000	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Petugas Operasional Pemeliharaan Kendaraan Alat Besar dan Pengelolaan Sampah		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		2 Orang		50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			53,000,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								60,000,000				67,000,000	
7 01 03 2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								45,000,000				49,500,000	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Dokumen RPTK		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		1 Dokumen		15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			17,500,000	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan (1. PKK 2. PENINGKATAN KAPASITAS RT/RW)		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		2 jenis		30,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			32,000,000	
7 01 03 2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								45,000,000				49,500,000	
7 01 03 2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								15,000,000				17,500,000	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Peserta Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (LPM, KARANG TARUNA, MUI)		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		70 Orang		15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			17,500,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Indikatif (Rp.)	Tolok Ukur	
7 01 04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					30,000,000						35,000,000
7 01 04	2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					30,000,000						35,000,000
7 01 04	2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		12 Bulan		15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			17,500,000
7 01 04	2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan (TARLING dan PHBI Lainnya)		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		2 Jenis		15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			17,500,000
7 01 05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					215,000,000						221,500,000
7 01 05	2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					215,000,000						221,500,000
7 01 05	2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN KEPALA DESA / TOKMAS/ TOGA		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		50 Orang		15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			17,500,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7	01	05	2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah											
7	01	05	2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Koordinasi Wawasan Kebangsaan		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		12 Bulan		25,000,000	Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum			27,000,000
7	01	05	2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Sosialisasi Stunting 1. Pengembangan 3. Peningkatan Usaha Ekonomi Wirausaha 4. Pembinaan Mitra Babinsa 5. Pembinaan Mitra Binmas 6. Sosialisasi Pencegahan Narkoba 7. Penanaman 1.000 Pohon 8. Rapat Koordinasi		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		8 Dokumen		175,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			177,000,000
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					230,000,000				256,000,000		
7	01	06	2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					230,000,000				256,000,000		
7	01	06	2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peserta SDM Aparatur Desa Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		14 Desa		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17,500,000
7	01	06	2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Peserta Fasilitasi Bimbingan Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Sekdes, Kasi Pemerintahan Desa)		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		28 Orang		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17,500,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Peserta Pengelolaan Keuangan Desa (Bendahra Desa, Kaur Perencanaan Desa)		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		28 Orang		15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			17,500,000	
7 01 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Peserta BIMTEK Pelaksanaan TUFOKSI Kades dan Perangkat Desa		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		14 Orang		15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			17,500,000	
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah Peserta BIMTEK Pelaksanaan TUSI Badan Permusyawaratan Desa		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		28 Orang		15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			17,500,000	
7 01 06 2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								230,000,000				256,000,000	
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Peserta Sinkronisasi Perencanaan Yang Baik Sesuai dengan Ketentuan		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		14 Desa		35,000,000	Dana Transfer Umum-			37,000,000	
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Peserta Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		40 Orang		35,000,000	Dana Transfer Umum-			37,000,000	
7 01 06 2.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Peserta Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kelembagaan Masyarakat Yang Profesionalisme		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		40 Orang		40,000,000	Dana Transfer Umum-			42,000,000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 06 2.01 13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Jumlah SDM Aparatur Desa Penyusunan Perencanaan Yang Baik		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		14 Desa		15,000,000	Dana Transfer Umum-			17,500,000	
7 01 06 2.01 16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		Jumlah Peserta Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		14 Desa		15,000,000	Dana Transfer Umum-			17,500,000	
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		Jumlah Pendampingan terhadap Aparatur Desa Yang Baik		Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan		14 Desa		15,000,000	Dana Transfer Umum-			17,500,000	
TOTAL									5,049,000,000				4,404,500,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Penelaahan hasil musrenbang tingkat desa serta musrenbang tingkat kecamatan menggambarkan pembangunan di Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut yang direncanakan untuk tahun anggaran 2022 dengan berbagai usulan dari masyarakat diantara usulan tersebut :

- A. Bidang Pemerintahan;
- B. Bidang Ekonomi :
- C. Bidang Sosial dan Budaya :
- D. Bidang Inprastruktur :

Dengan demikian hasil penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut telah menjadi rekomendasi Kecamatan untuk diusulkan melalui musrenbang tingkat Kabupaten Garut.

Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Tahun 2022 Berdasar OPD Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
URUSAN PEMERINTAHAN					
01	BIDANG PROGRAM PEMERINTAHAN				
	KEGIATAN :				
1	Pembangunan Kantor Kecamatan	Kecamatan Kadungora	Pelayanan Prima Unit Penyelenggaraan Publik	2.000.000.000 / 1 unit	Dinas PUPR
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Inovasi Kecamatan (Pelayanan Publik Online)	Kecamatan Kadungora	Efisiensi Akuntabilitas Kkianerja	100.000.000 / 1 paket	Sekretariat Daerah Kab. Garut
3	Pengadaan Alat pemadam Kebakaran	Desa Se-Kecamatan Kadungora	Indeks Risiko Bencana (IRB)	80.000.000/ 25 buah	Dinas Damkar
4	Pelatihan Pencegahan Dini Terhadap Bahaya Bencana	Desa Se-Kecamatan Kadungora	Indeks Risiko Bencana (IRB)	100.000.000 / 1 Paket	Dinas Damkar Kab.Garut
5	Pengadaan Sarana dan Prasaran Satpol PP Kecamatan	Kecamatan Kadungora	Kategori Pelayanan Prima unit penyelenggaraan publik	50.000.000 / 1 Paket	Dinas Satpol PP Kab. Garut
6	Pelatihan Linmas Desa dan Dikdas Anggpta Satpol PP Kecamatan	Kecamatan Kadungora	Kategori Pelayanan Prima unit penyelenggaraan publik	75.000.000 / 200 orang	Dinas Satpol PP Kab. Garut
7	Pembangunan Sekretariat Kantor Lembaga Desa	Desa Se-Kecamatan Kadungora	Pelayanan Prima Unit Penyelenggaraan Publik	180.000.000 / 18 Unit	Dinas PUPR
8	Rehab kantor Desa	Desa Se-Kecamatan Kadungora	Pelayanan Prima Unit Penyelenggaraan Publik	360.000.000 / 18 Unit	Dinas PUPR

02	BIDANG PROGRAM PEREKONOMIAN				
	KEGIATAN :				
1	Pengembangan Ternak Sapi Perah	3 Desa Kecamatan Kadungora	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	150.000.000 / 30 ekor	Dinas Peternakan dan Perikanan
2	Bantuan Bibit Peternakan	5 Desa Kecamatan Kadungora	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	100.000.000 / 5 Paket	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	Pembangunan Inprastruktur Jalan ke lahan pertanian	6 Desa Kecamatan Kadungora	meningkatkan peran ekonomi kerakyatan	600.000.000 / 6 unit	Dinas Pertanian
4	Bantuan Modal Produksi Pertanian	18 Desa Se-Kecamatan Kadungora	Optimalisasi bantuan kepada kelompok tani	540.000.000 / 1 paket	Dinas Pertanian
5	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan kelompok tani	18 Desa Se-Kecamatan Kadungora	Meningkatkan perana kelompok tani dan KWT	150.000.000 / 1 Paket	Dinas Peternakan dan Perikanan
6	Pengembangan Inovasi Posyandu Ternak dan Laboratorium Veteriner keliling	Desa Pamalayan Kecamatan Kadungora	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	5.000.000 / 1 paket	Dinas Peternakan dan Perikanan
7	Pengadaan Bantuan Alat Pertanian	8 Desa Kecamatan Kadungora	Peran ekonomi kerakyatan terhadap kemandirian ekonomi lokal	160.000.000 / 1 Paket	Dinas Pertanian
8	Fasilitasi pemberian bantuan modal usaha koperasi dan UKM	Desa Sirnagalih Kecamatan Kadungora	Prosentase usaha mikro terhadap UMKM	30.000.000 / 1 lembaga	Dinas Kopresai dan UKM
9	Bantuan Mesin Konveksi	5 Desa Karyajaya Kecamatan Kadungora	Penumbuhan Wirausaha baru agro dan non agro	50.000.000 / 20 Unit	Disperindag dan ESDM
10	Bantuan Modal UKM	18 Desa Se-Kecamatan Kadungora	Meningkatkan peran ekonomi kerakyatan	200.000.000 / 18 Desa	Dinas Koperasi dan UKM
11	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	Wilayah Kecamatan Kadungora	Kontribusi Perdagangan ternak terhadap PDRB	50.000.000 / 1 Unit	Dinas Peternakan dan Perikanan
12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Produksi hasil peternakan	Wilayah Kecamatan Kadungora	Pengembangan kawasan peternakan	100.000.000 / 1 unit	Dinas Peternakan dan Perikanan
13	Pembangunan Gudang pengolahan pasca panen	Desa Karyajaya Kecamatan Kadungora	Pengembangan lumbung Pangan Masyarakat	120.000.000 / 1 unit	Dinas Ketahanan Pangan
14	Pembangunan Drainase	Pasar Andir Kecamatan Kadungora	Revitalisasi Pasar Rakyat	15.000.000 / 200 M	Diperindag dan ESDM
03	BIDANG PROGRAM INPRASTRUKTUR				
	KEGIATAN :				
1	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih	10 Desa Kecamatan Kadungora	Prosentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air bersih	1.000.000.000 / 10 Desa	Dinas PUPR
2	Pembangunan Rumah Tidak Layak Hhuni	18 Desa Se-Kecamatan Kadungora	Penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan hidup	2.190.000.000 / 197 unit	Disperkim

3	Pembangunan Saluran Irigasi	6 Desa Kecamatan Kadungora	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	695.000.000 / 725 M	Dinas PUPR
4	Pengaspalan Poros Jalan Desa	3 Desa Kecamatan Kadungora	Meningkatkan Aksesibilitas Mobilitas Transpromasi	650.000.000 / 12 Km	Dinas PUPR
5	Pemasangan Fasilitas Perhubungan Jalan Transsportasi	18 Desa Se-Kecamatan Kadungora	Penerangan Jalan Umum (PJU)	540.000.000 / 108 Unit	Dinas Perhubungan
6	Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas Transportasi umum	3 Desa Kecamatan Kadungora	Pembangunan Jembatan	1.700.000.000 / 1 Unit	Dinas PUPR
7	Pembangunan sarana TPS dan pengadaan alat angkut sampah dump truck	7 Desa Kecamatan Kadungora	Indeks kualitas lingkungan hidup dalam pelayanan sampah	2.100.000.000 / 1 Paket	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Garut
8	Pengadaan Lahan untuk TPU	5 Desa Kecamatan Kadungora	Meningkatkan penegemndalaian pemanfaatan ruang	750.000.000 / 5 Unit	Bappeda Kab. Garut
9	Rehab / Pembangunan Lapang Alun-alun	Desa Kecamatan Kadungora	Penataan lingkungan menuju sarana wisata	250.000.000 / 1 Unit	Dinas PUPR
04 BIDANG PROGRAM SOSIAL DAN BUDAYA					
KEGIATAN :					
1	Insentif Guru Ngaji	18 Desa Se-Kecamatan Kadungora	Meningkatkan kesejahteraan bidang keagamaan	172.000.000 / 144 Orang	Sekretariat Daerah Kab. Garut
2	Pembentukan Kampung Keluarga Berencana (KB)	18 Desa Se-Kecamatan Kadungora	Angka harapan hidup	13.500.000 / 24 Unit	DPPKBP3A Kab. Garut
3	Pembinaan Kampung Keluarga Berencana (KB)	18 Desa Se-Kecamatan Kadungora	Meningkatkan kualitas melalui integrasi program SKPD	100.000.000 / 1 Paket	DPPKBP3A Kab. Garut
4	Penanggulangan Program Stunting	18 Desa Se-Kecamatan Kadungora	Perbaikan Gizi penderita stunting	90.000.000 / 1 Paket	Dinas Kesehatan Kab. Garut
5	Sosialisasi SMD dan MMD	18 Desa Se-Kecamatan Kadungora	promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	90.000.000 / 1 Paket	Dinas Kesehatan Kab. Garut
6	Pembinaan Satgas dan Gustu Perlindungan perempuan dana anak	18 Desa Se-Kecamatan Kadungora	Indeks Pemberdayaan Gender	18.000.000 / 1 Paket	DPPKBP3A Kab. Garut
7	Operasional Institusi Masyarakat Pedesaan Pos KB dan Sub Pos KB	18 Desa Se-Kecamatan Kadungora	Indeks Pemberdayaan Gender	166.000.000 / 167 Unit	DPPKBP3A Kab. Garut
8	Rapat Koordinasi Tingkat Desa	18 Desa dan Kecamatan Kadungora	Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	138.000.000 / 19 Paket	DPPKBP3A Kab. Garut
9	Kegiatan UP Date	Desa dan RW Se-	Pengembangan	52.800.000 / 1	DPPKBP3A

	Data Keluarga Sejahtera Tingkat Desa dan RW	Kecamatan Kadungora	Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Paket	Kab. Garut
10	Pelatihan kapasitas pemberdayaan kepemudaan	18 Desa Se-Kecamatan Kadungora	Presentase Organisasi Kepemudaan	50.000.000 / 150 Orang	Dispora Kab. Garut
11	Pelatihan Peningkatan Wawasan Kebangsaan Ormas dan OKP	18 Desa Se-Kecamatan Kadungora	Presentase Organisasi Kepemudaan	35.000.000 / 100 Orang	Bakesbangpol Kab. Garut
12	Bantuan Operasional Kesehatan	9 Desa Kecamatan Kadungora	Angka harapan hidup	816.750.000 / 1 paket	Dinas Kesehatan Kab. Garut
13	Pelayanan dukungan BLUD UPT Puskesmas	Puskesmas Kadungora	Angka harapan hidup	4.878.280 / 1 paket	Dinas Kesehatan Kab. Garut
14	Pembangunan Gedung Rawat Inap UPT Puskesmas	Puskesmas Kadungora	Angka harapan hidup	2.500.000.000 / 1 paket	Dinas Kesehatan Kab. Garut
15	Pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limpak (IPAL)	Puskesmas Kadungora	Angka harapan hidup	500.000.000 / 1 paket	Dinas Kesehatan Kab. Garut
16	Pemicuan 5 Pilar STMB	Puskesmas Kadungora	Angka harapan hidup	50.000.000 / 9 Desa	Dinas Kesehatan Kab. Garut
17	Rehab Ruang Kelas SD dan jamban Sekolah	Korwil Pendidikan Kecamatan Kadungora	Meningkatkan akses dan tingkat pendidikan masyarakat	3.205.000 / 24 Unit	Dinas Pendidikan Kab. Garut
18	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten Garut	Kecamatan Kadungora	Aktivitas keagamaan dilingkungan pemerintah dan masyarakat	100.000.000 / 1 paket	Sekretariat Daerah Kab. Garut
19	Perencanaan Sosialisasi Kecamatan Sehat	Kecamatan Kadungora	Angka harapan hidup	40.000.000 / 1 paket	Bappeda Kab. Garut
20	Rehab Gedug Olah Raga	Desa Sukarame Kecamatan Kadungora	Pembinaan Olah Raga	200.000.000 / 2 Unit	Dispora Kab. Garut
21	Pembangunan MCK	18 Desa Se-Kecamatan Kadungora	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	180.000.000 / 18 Unit	Dinas Kesehatan Kab. Garut
22	Rehab Pembangunan masjid Besar kaum Kadungora	Desa Kadungora Kecamatan Kadungora	Aktivitas keagamaan dilingkungan pemerintah dan masyarakat	200.000.000 / 1 Unit	Sekretariat Daerah Kab. Garut
JUMLAH				13.963.030.900	

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Kebijakan – kebijakan nasional yang perlu didukung oleh Kecamatan Kadungora sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu dalam rangka penanggulangan kemiskinan dalam hal ini melakukan kegiatan – kegiatan monitoring penyaluran beras miskin serta program pupuk bersubsidi, selain itu pula program – program dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda) serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Garut sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Kadungora di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Kadungora yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Kadungora telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan

- a. Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan ;
- b. Meningkatkan Profesionalisme Pegawai .

Sasaran

- a. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih
- b. Meningkatnya SDM Aparatur yang Professional, Disiplin dan Berwibawa

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Kadungora mempunyai **tujuan** : *“Mewujudkan pelayanan publik kecamatan yang profesional dan amanah”*

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Kadungora Tahun 2022 adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan.
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Kadungora Tahun 2022 adalah :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Prosentase Desa Berkinerja Baik

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Kadungora Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan Kadungora Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan pelayanan publik kecamatan yang profesional dan amanah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosentase Desa Berkinerja Baik	100 %

3.3 Program dan Kegiatan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Kadungora merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Kadungora sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Kadungora diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih.

Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Kadungora merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian MDG's

Millinium Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya.

Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Kadungora diimplementasikan untuk mencapai target – target MDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggungan kemiskinan di Kecamatan Kadungora.

Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2022 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi.

Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Kadungora diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan PATEN.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Kadungora sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut.

Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan tas dan bendera, dibidang makanan seperti burayot, ranginang, dodol, kerupuk, kerupuk kulit, tahu, dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti ikan, ayam, domba.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Kadungora melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Kadungora Tahun 2022 adalah 6 (enam) Program dan 17 (tujuh belas) Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kadungora sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Kadungora dan mencakup semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp. 4.994.985.460,-.

Adapun Program Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut pada Tahun 2022 sesuai dengan Permendagri 90, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
3. Program Pemnberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan Kecamatan Kadungora pada Tahun 2022 adalah :

I. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 6) Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perngkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji ASN
- 2) Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semeseter SKPD

3. Administrasi Barang Mlik Daerah Pada Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
- 4) Sosialisasi Peraturan Perundangan

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 8) Dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pengadaan ALat Besar
- 3) Pengadaan Mebel
- 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas Taua Dinas Jabatan
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- 3) Pemeliharaan Mebel
- 4) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- 1) Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada DIkecamatan

- 1) Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat

- 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Non Perizinan

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- 2) Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

- 6) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Masyarakat

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta

Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- 2) Fasilitasi dan Pembinaan (Bimtek) Sosialisasi, Konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- 3) Pelaksanaan Tugas Forum Pimpinan Kecamatan

VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- 2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- 3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- 4) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 5) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan permusyawaratan Desa
- 6) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- 7) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 8) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Pokok, Fungsi dan Keajiban Lembaga Kemasyarakatan
- 9) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
- 10) Fasilitasi Penyusunan Pelaksanaan Program dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
- 11) Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.33 berikut ini :

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kadungora

lembar 1 dari 5

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN						4,994,985,460			4,442,500,000				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4,013,871,060			3,474,000,000				
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						86,538,800			113,000,000				
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	19,451,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	23,000,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3,318,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	12,000,000

7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	9,783,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	12,000,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	9,783,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	12,000,000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	9,498,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	12,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	9,813,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	12,000,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Tata Laksana Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	24,892,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	30,000,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,516,786,040					2,629,500,000	

7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	1 Laporan	2,493,230,040	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	2,600,000,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Laporan	9,403,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	12,000,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan / Semes teran SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Berkas untuk Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	1 Laporan	14,153,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	17,500,000
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							6,473,000				17,500,000		
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan BMD	Jumlah Dokumen Perencanaan Barang	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	1 Dokumen	6,473,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	17,500,000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							71,676,700				88,500,000		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Kebutuhan Pakaian Dinas Pegawai	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	33 Orang	1 Dokumen	23,907,900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	32,000,000

7	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	1 Dokumen	24,383,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	27,000,000
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Pengiriman ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	4 Orang	1 Dokumen	13,704,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	17,500,000
7	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Peserta Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	70 Orang	1 Dokumen	9,681,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	12,000,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							324,687,000					349,000,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	10 Item	1 Dokumen	14,996,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	17,500,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	12 Item	1 Dokumen	149,881,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	155,000,000

7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang mamadai	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	16 Item	1 Dokumen	19,957,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	23,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	2 jenis	1 Dokumen	19,940,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	24,000,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah surat kabar sesuai kebutuhan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	4 jenis	1 Dokumen	9,563,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	12,000,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	1350 Orang	1 Dokumen	36,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	38,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Kegiatan Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	336 Orang	1 Dokumen	59,736,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	62,000,000
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Operator Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang	1 Dokumen	14,613,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	17,500,000

7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							877,035,000				94,500,000		
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik DAerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	1 Dokumen	75,237,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	0
7	01	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dum Truk Pengangkut Sampah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik DAerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	1 Dokumen	585,228,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	0
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Pengadaan Mebel	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik DAerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	3 jenis	1 Dokumen	52,154,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	77,000,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya (Jet Pum)p	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik DAerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	1 Dokumen	14,828,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	17,500,000
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Pengadaan Bangunan Lainnya (Pemagaran Kantor Kecamatan)	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik DAerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	1 Gedung	1 Dokumen	149,587,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	0
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							47,258,720				88,500,000		

7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telpn dan Internr	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	1 Tahun	18,611,120	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	21,000,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	7 Item	1 Tahun	14,320,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	17,500,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Petugas Kebersihan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang	1 Tahun	14,327,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	50,000,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							83,415,800					93,500,000	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Pembayaran STNK Pajak Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	9 Unit	1 Tahun	29,197,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	32,000,000
7	01	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan ALat Besar Yang Memadai/ Terpelihara	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	1 Tahun	15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	17,500,000

7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Mebel Yang Memadai/ Terpelihara	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	3 Jenis	1 Tahun	10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	12,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Bangunan/ Gedung Yang Terpelihara (Rumah Dinas dan Gedung Kantor)	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	2 Gedung	1 Tahun	29,218,300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	32,000,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							338,853,800					351,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							211,189,000						216,000,000
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Kecamatan Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Jenis Pelaksanaan Kegiatan (1. PENANGGULANGAN COVID 2. PENINGKATAN 3. PEMBINAAN DESA 4. LOMBA DESA5. PHBN 6. MONITORING BPNT 7. PBB 8. MONITORING PROYEK PEMBANGUNAN)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 % 100 %	8 Jenis	1 Tahun	211,189,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Kecamatan Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 % 100 %	216,000,000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							79,664,800					82,000,000	

7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Jenis Pelaksanaan Pelayanan (1 Paten 2. SKM)	Jumlah Penyelenggaraan PATEN	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	2 jenis	1 Tahun	79,664,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	82,000,000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							48,000,000				53,000,000	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Petugas Operasional Pemeliharaan Kendaraan ALat Besar dan Pengelolaan Sampah	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang	1 Tahun	48,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	53,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							57,836,600				67,000,000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							42,864,800				49,500,000	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang dapat Diberdayakan	Jumlah Dokumen RPTK	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Tahun	14,803,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang dapat Diberdayakan	100 %	17,500,000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang dapat Diberdayakan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan (1. PKK 2. Peningkatan Kapasitas RT/RW)	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	2 jenis	1 Tahun	28,061,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang dapat Diberdayakan	100 %	32,000,000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							14,971,800				17,500,000	

7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Masyarakat Desa / Kelurahan yang dapat Diberdayakan	Jumlah Peserta Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (LPM, KARANG TARUNA, MUI)	Jumlah Kegiatan Pembedayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	70 Orang	1 Tahun	14,971,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa / Kelurahan yang dapat Diberdayakan	100 %	17,500,000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							135,472,800					35,000,000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							135,472,800						35,000,000
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	123,561,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	17,500,000
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan (TARLING dan PHBI Lainnya)	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	2 Jenis	100 %	11,911,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	17,500,000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							238,738,200						259,500,000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							238,738,200						259,500,000

7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN KEPALA DESA / TOKMAS/ TOGA	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	50 Orang	1 Tahun	14,671,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100 %	17,500,000
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Terepenuhinya Aparatur Desa Yang Profesional	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	14 Desa	1 Tahun	50,000,000	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum	N r	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100 %	65,000,000

7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Pimpinan di Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Sosialisasi Stunting 2. Pengembangan Peningkatan Usaha Ekonomi Wirausaha 4. Pembinaan Mitra Babinsa 5. Pembinaan Mitra Binmas 6. Sosialisasi Pencegahan Narkoba 7. Penanaman 1.000 Pohon 8. Rapat Koordinasi	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	8 Dokumen	1 Tahun	174,067,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100 %	177,000,000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							210,213,000				256,000,000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							210,213,000				256,000,000	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Peserta SDM Aparatur Desa Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Desa yang Diberikan Pengawasan dan Pembinaan	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	14 Desa	100 %	14,182,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	17,500,000

7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Peserta Fasilitasi Bimbingan Administrasi Tata Pemerintahan Desa (SEKDES, KASI PEMERINTAHAN DESA)	Persentase Desa yang Diberikan Pengawasan dan Pembinaan	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	28 Orang	100 %	14,986,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	17,500,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Peserta Pengelolaan Keuangan Desa (Bendahra Desa, Kaur Perencanaan Desa)	Persentase Desa yang Diberikan Pengawasan dan Pembinaan	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	28 Orang	100 %	14,986,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	17,500,000
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Peserta BIMTEK Pelaksanaan TUFOKSI Kades dan Perangkat Desa	Persentase Desa yang Diberikan Pengawasan dan Pembinaan	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	14 Orang	100 %	14,391,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	17,500,000
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Peserta BIMTEK Pelaksanaan TUSI Badan Permusyawaratan Desa	Persentase Desa yang Diberikan Pengawasan dan Pembinaan	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	28 Orang	100 %	14,601,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	17,500,000

7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Peserta Sinkronisasi Perencanaan Yang Baik Sesuai dengan Ketentuan	Persentase Desa yang Diberikan Pengawasan dan Pembinaan	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	14 Desa	100 %	27,408,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	37,000,000
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Peserta Fasilitasi Penyelenggaraan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Desa yang Diberikan Pengawasan dan Pembinaan	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	40 Orang	100 %	34,533,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	37,000,000
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Peserta Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kelembagaan Masyarakat Yang Profesionalisme	Persentase Desa yang Diberikan Pengawasan dan Pembinaan	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	40 Orang	100 %	35,131,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	42,000,000
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah SDM Aparatur Desa Penyusunan	Persentase Desa yang Diberikan Pengawasan dan	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	14 Desa	100 %	11,091,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	17,500,000

						Perencanaan Yang Baik	Pembinaan											
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Peserta Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa yang Diberikan Pengawasan dan Pembinaan	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	14 Desa	100 %	14,661,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	17,500,000
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Pendampingan terhadap Aparatur Desa Yang Baik	Persentase Desa yang Diberikan Pengawasan dan Pembinaan	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	14 Desa	100 %	14,240,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	17,500,000
TOTAL												4,994,985,460					4,442,500,000	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Kecamatan Kadungora Tahun 2022 yaitu dengan melaksanakan 6 program dan 16 Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2022 di Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut sebesar Rp. 4.994.985.460, yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, rincian sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 2) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 19.451.400,-
 - Keluaran : Penyusunan Dokumen Perencanaan
 - Hasil : Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 3.318.000,-
 - Keluaran : Penyusunan Dokumen Perencanaan
 - Hasil : Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 9.783.000,-
 - Keluaran : Penyusunan Dokumen Perencanaan
 - Hasil : Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik
- 4) Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 9.783.000,-
 - Keluaran : Penyusunan Dokumen Perencanaan
 - Hasil : Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 9.498.000,-
 - Keluaran : Penyusunan Dokumen Perencanaan
 - Hasil : Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik
- 6) Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 9.813.000,-
 - Keluaran : Penyusunan Dokumen Perencanaan
 - Hasil : Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 24.892.400,-
 - Keluaran : Penyusunan Dokumen Perencanaan
 - Hasil : Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji ASN
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 2.493.230.040,-
 - Keluaran : Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
 - Hasil : Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik
- 2) Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 9.403.000,-
 - Keluaran : Penyusunan Dokumen Perencanaan
 - Hasil : Jumlah Penyusunan Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah
 - Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semeseter SKPD
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 14.153.000,-
 - Keluaran : Penyusunan Dokumen Perencanaan
 - Hasil : Jumlah Penyusunan Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah
 - Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

3. Administrasi Barang Mlik Daerah Pada Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 6.473.000,-
 - Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan BMD
 - Hasil : Jumlah Dokumen Barang Perencanaan
 - Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 23.907.900,-
 - Keluaran : Kebutuhan Pakaian Dinas Pegawai
 - Hasil : Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribunya
 - Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik
- 2) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 24.383.600,-
 - Keluaran : Pelaksanaan Koordinasi Sistem Informasi Kepegawaian
 - Hasil : Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Sistem Informasi Kepegawaian
 - Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik
- 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 13.704.000,-
 - Keluaran : Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Hasil : Jumlah pengiriman ASN mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik
- 4) Sosialisasi Peraturan Perundangan
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 13.704.000,-
 - Keluaran : Sosialisasi Peraturan Perundangan
 - Hasil : Jumlah Peserta Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan perundang - undangan
 - Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 14.960.000,-
 - Keluaran : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Hasil : Jumlah item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

- 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 149.881.200,-
 - Keluaran : Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Hasil : Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 19.957.400,-
 - Keluaran : Peralatan Rumah Tangga Yang Memadai
 - Hasil : Jumlah Item Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 19.940.000,-
 - Keluaran : Barang Cetak dan Penggandaan
 - Hasil : Jumlah Jenis Penyediaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 9.563.400,-
 - Keluaran : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Hasil : Jumlah exemplar Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

- 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Masukan : APBD 2022 Rp. 36.000.000,-
 Keluaran : Fasilitasi Kunjungan Tamu
 Hasil : Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Masukan : APBD 2022 Rp. 59.736.000,-
 Keluaran : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 Hasil : Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik
- 8) Dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD
- Masukan : APBD 2022 Rp. 14.613.000,-
 Keluaran : Pelaksanaan Sistem Pemerinthan Berbasis Elektronik
 Hasil : Jumlah Pelaksanaan Sistem Pemerinthan Berbasis Elektronik
 Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Masukan : APBD 2022 Rp. 75.237.000,-
 Keluaran : Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan
 Hasil : Jumlah item Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan
 Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik
- 2) Pengadaan Alat Besar
- Masukan : APBD 2022 Rp. 585.228.000,-
 Keluaran : Pengadaan Kendaraan Alat Besar
 Hasil : Jumlah item Pengadaan Alat Besar
 Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

- 3) Pengadaan Mebel
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 52.154.000,-
 - Keluaran : Pengadaan Mebel
 - Hasil : Jumlah item Pengadaan Jet Pump
 - Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik
- 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 14.828.200,-
 - Keluaran : Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya
 - Hasil : Jumlah item Pengadaan Mebel
 - Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik
- 5) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 149.587.800,-
 - Keluaran : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Hasil : Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 18.611.120,-
 - Keluaran : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Hasil : Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik
- 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 14.320.000,-
 - Keluaran : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Hasil : Jumlah item Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara
 - Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 14.327.600,-
 - Keluaran : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Hasil : Jumlah Item Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas Taua Dinas Jabatan
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 29.197.500,-
 - Keluaran : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Hasil : Jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan
 - Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 15.000.000,-
 - Keluaran : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Besar
 - Hasil : Jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan Besar
 - Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

- 3) Pemeliharaan Mebel
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 10.000.000,-
 - Keluaran : Penyediaan Jasa Pemeliharaan Mebeler
 - Hasil : Jumlah item pembayaran pemeliharaan Mebel
 - Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

- 4) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 29.218.300,-
 - Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor dan bangunan Lainnya
 - Hasil : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah
 - Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

1). Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- Masukan : APBD 2022 Rp. 211.189.000,-
Keluaran : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Hasil : Jumlah pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada DIkecamatan

1) Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

- Masukan : APBD 2022 Rp. 79.664.800,-
Keluaran : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Hasil : Jumlah jenis pelayanan
Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Non Perizinan

- Masukan : APBD 2022 Rp. 48.000.000,-
Keluaran : Petugas Operasional Pemeliharaan Kendaraan Alat Besar dan pengelolaan Sampah
Hasil : Jumlah Petugas Operasional Pemeliharaan Kendaraan Alat Besar dan pengelolaan Sampah
Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Masukan : APBD 2022 Rp. 14.803.600,-
Keluaran : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Hasil : Jumlah dokumen RPTK
Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

- 2) Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Masukan : APBD 2022 Rp. 28.061.200,-
Keluaran : Peningkatan Efektivitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan
Hasil : Jumlah Pelaksanaan Kegiatan TP-PKK; Peningkatan Kapasitas Rt/ RW
Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

- 1) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

Masukan : APBD 2022 Rp. 13.324.900,-
Keluaran : Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
Hasil : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Masukan : APBD 2022 Rp. 123.561.600,-
Keluaran : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dan desa
Hasil : Jumlah pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan kedalaman RKA)
Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

- 2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Masyarakat
- Masukan : APBD 2022 Rp. 11.91.200,-
 Keluaran : Pelaksanaan kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh
 Hasil : Jumlah pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan kedalaman RKA)
 Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Masukan : APBD 2022 Rp. 14.671.200,-
 Keluaran : Pembinaan Kepala Desa/ Tokmas/ Toga
 Hasil : Jumlah pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan kedalaman RKA)
 Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik
- 2) Fasilitasi dan Pembinaan (Bimtek) Sosialisasi, Konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- Masukan : APBD 2022 Rp. 50.000.000,-
 Keluaran : Fasilitasi dan Pembinaan (Bimtek) Sosialisasi, Konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 Hasil : Jumlah pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan kedalaman RKA)
 Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik
- 3) Pelaksanaan Tugas Forum Pimpinan Kecamatan
- Masukan : APBD 2022 Rp. 174.067.000,-
 Keluaran : Fasilitasi dan Pembinaan (Bimtek) Sosialisasi, Konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 Hasil : Jumlah pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan kedalaman RKA)
 Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 14.182.400,-
 - Keluaran : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - Hasil : Jumlah Peserta SDM Aparatur Desa
 - Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik
- 2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 14.986.200,-
 - Keluaran : Fasilitasi Bimbingan Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Hasil : Jumlah Peserta Bimbingan Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik
- 3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 14.986.200,-
 - Keluaran : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Hasil : Jumlah Peserta Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik
- 4) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 14.391.200,-
 - Keluaran : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Hasil : Jumlah Peserta Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik
- 5) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan permusyawaratan Desa
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 14.601.200,-
 - Keluaran : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi BPD
 - Hasil : Jumlah Peserta Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi BPD
 - Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

- 6) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- Masukan : APBD 2022 Rp. 27.408.600,-
- Keluaran : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- Hasil : Jumlah Peserta Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik
- 7) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Masukan : APBD 2022 Rp. 35.533.000,-
- Keluaran : Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Hasil : Jumlah Peserta Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik
- 8) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Pokok, Fungsi dan Keajiban Lembaga Kemasyarakatan
- Masukan : APBD 2022 Rp. 35.131.200,-
- Keluaran : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Pokok, Fungsi dan Keajiban Lembaga Kemasyarakatan
- Hasil : Jumlah Peserta Pelaksanaan Tugas, Pokok, Fungsi dan Keajiban Lembaga Kemasyarakatan
- Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik
- 9) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
- Masukan : APBD 2022 Rp. 11.091.200,-
- Keluaran : Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
- Hasil : Jumlah Peserta Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
- Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

- 10) Fasilitasi Penyusunan Pelaksanaan Program dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
- Masukan : APBD 2022 Rp. 14.661.200,-
Keluaran : Fasilitasi Penyusunan Pelaksanaan Program dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
Hasil : Jumlah Peserta Penyusunan Pelaksanaan Program dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik
- 11) Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
- Masukan : APBD 2022 Rp. 14.240.000,-
Keluaran : Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
Hasil : Jumlah Pendampingan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
Pencapaian : Persentase ASN yang memiliki prestasi kerja baik

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Kadungora. Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

BAB V

P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Kadungora dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Garut di Kecamatan Kadungora

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Kadungora. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Kadungora ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Garut secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana Kinerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi *seluruh* pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renja yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Visi **Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju, dan Sejahtera.**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN